

PEMAHAMAN GURU MATA PELAJARAN PPKn TENTANG MATERI KONSTITUSI NRI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA SURABAYA

Sa'adatul Lailiya

104254039 (PPKn, FIS, UNESA) saadatul.lailiya17@gmail.com

Harmanto

0001047104 (PPKn, FIS, UNESA) harmanto.unesa2005@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap pemahaman yang dimiliki guru mata pelajaran PPKn tentang materi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia di Sekolah Menengah Pertama wilayah Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, yaitu dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tipe metode campuran yang digunakan ialah tipe *Explanatory Mixed Methods Designs*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa pemahaman guru PPKn SMP terhadap materi Konstitusi cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil perolehan uji pemahaman guru bahwa, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan rata-rata secara keseluruhan sebesar 63,5% dengan nilai minimal 22,5% dan nilai maksimal 87,5%. Terdapat 15 orang guru yang mendapatkan hasil perolehan skor prosentase di atas rata-rata (63,5%), serta juga terdapat 15 orang guru yang mendapatkan hasil perolehan skor prosentase di bawah rata-rata. Sedangkan hasil penelitian kualitatif menunjukkan ada 3 hal yang berkaitan dalam pemahaman guru PPKn yaitu, strategi belajar guru, sumber belajar guru, serta faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman guru. Strategi belajar guru berkaitan dengan cara belajar guru dalam mengembangkan kemampuan memahami suatu materi. Sumber belajar guru berkaitan dengan sumber pengetahuan yang didapatkan oleh guru. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi berkaitan dengan hal-hal yang melatarbelakangi munculnya suatu pemahaman dalam diri seorang guru. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua bagian, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan usia, ketertarikan, kemampuan kognitif, hambatan mental, serta aspek profesional. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan termasuk pula kurikulum di dalamnya.

Kata Kunci : kompetensi profesional, pemahaman guru, konstitusi.

Abstract

This study was conducted to unravel the understanding Civic Education teachers about the material Constitution of the Republic of Indonesia in Junior High School area of Surabaya. The method used in this study is a mixed methods, namely by combining quantitative and qualitative approaches. Type of method used is a mixture of types *Explanatory Mixed Methods Designs*. Data collection techniques used were a test and in-depth interviews. The results of quantitative research shows that Civic Education teachers' understanding of the material Constitution in junior high school was pretty well. It can be shown from the results of the acquisition test teachers' understanding that, based on the results of the calculation, the overall average of 63,5% with a minimum value of 22,5% and a maximum value of 87,5%. There are 15 teachers who get a percentage of the proceeds scores above average (63,5%), and 15 teacher who get a percentage of the proceeds scores below average. While the results of qualitative research indicates there are three issues related to understanding that civic education teacher, the teacher learning strategy, the teacher learning resource's, as well as factors that affect teachers' understanding level. Learning strategies related to teacher learning teachers in developing the ability to understand the material. The teacher learning resource's with regard to the source of the knowledge gained by the a teacher. And the factors that influence relating to matters underlying the emergence of understanding of a teacher. These factors are divided into two parts, namely the internal factors and external factors. Internal factors related to age, interests, cognitive abilities, mental barriers, as well as the professional aspect. While external factors related to the environment including the curriculum in it.

Keywords : professional competence, understanding teachers, constitution.

PENDAHULUAN

Guru merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan paling penting dalam sistem pendidikan nasional

yakni berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan. Peran guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peranan guru sebagai fasilitator, motivator,

pemacu, pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik (Mulyasa, 2007: 53). Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru yang profesional memiliki kemampuan-kemampuan yang diamanatkan oleh undang-undang guna memenuhi profesionalisme dalam menjadi pendidik bangsa sehingga mampu menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas. Tidak semua orang yang merasa pandai lantas berhak menjadi seorang guru, sebab seorang guru adalah tenaga profesional yang harus memiliki kompetensi-kompetensi tertentu. Kompetensi merupakan ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional dengan bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan (Suparlan, 2006: 85). Pada dasarnya kompetensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Kompetensi guru sebagai pendidik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk mendidik siswa agar mencapai kompetensi sesuai dengan tujuan pendidikan (Ningrum, 2009: 97).

Berdasarkan hasil Ujian Kompetensi Awal (UKA) secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diikuti 286.500 peserta, yang lulus sebanyak 249.001 orang. Jika dihitung secara prosentase maka kelulusannya mencapai 86,91 persen. Namun nilai rata-rata yang dihasilkan masih jauh dari harapan, yakni masih di bawah 50,00 (ukg.kemendikbud.go.id/info). Hal ini menunjukkan masih jauhnya kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru dari standar nasional yang diharapkan oleh pemerintah. Adapun materi yang diujikan dalam Uji Kompetensi Guru ini berkaitan dengan rumpun keilmuan dari masing-masing program studi atau mata pelajaran yang diampu oleh guru.

Penguasaan guru terhadap isi dan materi bahan ajar, tentunya memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Hal ini dikarenakan seorang guru dianggap sebagai sumber belajar yang lebih berpengaruh bagi peserta didik. Dengan demikian, dalam kompetensi profesionalisme guru yang berhubungan dengan penguasaan terhadap materi dan dalam proses penjelasan terkait isi dari materi yang ada tentunya harus sesuai dengan apa yang telah dicantumkan pada tujuan pembelajaran yang telah terlebih dahulu disusun. Sehingga materi yang tersampaikan kepada peserta didik dapat selaras dengan tujuan pembelajaran

yang diharapkan. Namun, guru juga harus tetap mengacu pada kurikulum yang ada sebagai landasan utama untuk menentukan pokok bahasan yang akan disajikan.

Kurikulum merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini adalah tujuan pendidikan. Dalam perkembangannya, kurikulum yang ada di dalam dunia pendidikan kerap kali mengalami beberapa kali perubahan. Pada Kurikulum 2013, bahan ajar telah disediakan oleh pemerintah. Mulai dari silabus pembelajaran, buku pedoman baik untuk guru dan untuk siswa telah dibuatkan secara khusus oleh pemerintah guna menyelaraskan kegiatan belajar mengajar antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya dalam lingkup nasional. Peranan guru dalam Kurikulum 2013 dituntut untuk lebih kreatif dalam mengemas materi pembelajaran menjadi suatu hal yang mudah dan menyenangkan. Materi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru dapat bersifat kontekstual, yaitu memiliki konektivitas dengan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan nyata, sehingga membutuhkan data aktual atau contoh-contoh konkrit.

Konstitusi memiliki hubungan yang erat dengan eksistensi berdirinya suatu negara. Sebagai negara hukum, maka segala hal yang berkaitan dengan tata kehidupan warga negaranya telah diatur dan ditetapkan dalam sebuah peraturan khusus baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Seorang guru mata pelajaran PPKn tentunya harus menguasai secara keseluruhan dan mendalam terkait materi Konstitusi yang diajarkan di jenjang pendidikan yang diampunya.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menitik beratkan pengembangan pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk para peserta didik. Sejauh ini, mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang memiliki andil besar dalam hal pembekalan wawasan kebangsaan kepada generasi bangsa. Dan ketiga aspek yang ingin dicapai melalui Kurikulum 2013 terkandung dalam komponen yang hendak dikembangkan di dalam materi pembelajaran PPKn yang ada, diantaranya ialah : *civic knowledge*, yaitu pengetahuan kewarganegaraan, yang merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara, misalnya hak dan kewajiban warga negara, pemerintahan dan sistem sosial; *civic skills*, yaitu keterampilan kewarganegaraan, merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan yang dimanfaatkan dalam menghadapi masalah dalam kehidupan berbangsa bernegara; dan *civic dispositions*, yaitu karakter kewarganegaraan, yang merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, sistem politik yang berfungsi sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum.

Materi terkait Konstitusi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kurikulum 2013 telah disajikan mulai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VII, VIII, dan IX. Hal ini penting untuk dikaji dikarenakan di dalam Kurikulum 2013 baik tingkat SMP maupun SMA konten materi Konstitusi memiliki tingkat prosentase lebih banyak dibandingkan dengan materi yang lain. Materi-materi tersebut tentu memiliki tingkat urgensi yang cukup besar dalam hal pengetahuan yang harus dimiliki dan dipahami oleh warga negara terkait sejarah penyusunan dan pemberlakuan hukum di negara Indonesia hingga saat ini. Disamping itu, masyarakat yang berkualitas bukan hanya masyarakat yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, namun juga memiliki kesadaran akan hukum yang berlaku pada negara tempat dimana ia tinggal. Telah diketahui bersama bahwasannya negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini tersurat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang telah diamandemen, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Untuk itu, pengetahuan terkait hukum erat kaitannya dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Seorang guru PPKn sudah tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait hukum, dalam hal ini adalah Konstitusi guna memberikan pembelajaran yang profesional terkait materi tentang konstitusi kepada peserta didik.

Kajian terkait pemahaman guru telah digunakan oleh beberapa peneliti guna mengukur sejauh mana kemampuan kognitif yang dimiliki oleh seorang guru profesional. Bertolak dari beberapa hal tentang betapa pentingnya profesionalisme guru dalam penguasaan terhadap materi pembelajaran dan prosentase materi terkait konstitusi dalam Kurikulum 2013, maka peneliti ingin mengkaji lebih mendalam tentang sejauh mana kompetensi profesional yang berkaitan dengan pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat Sekolah Menengah Pertama yang tergabung ke dalam anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Surabaya terkait materi Konstitusi dalam Kurikulum 2013.

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut di dalam penelitian ini diantaranya ialah, (1) Bagaimana pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang materi Konstitusi Negara Republik Indonesia di Sekolah Menengah Pertama Kota Surabaya? (2) Mengapa pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang materi Konstitusi Negara Republik Indonesia di Sekolah Menengah Pertama Kota Surabaya seperti itu? (3) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang

materi Konstitusi Negara Republik Indonesia di Sekolah Menengah Pertama Kota Surabaya?

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka secara khusus penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk menganalisis pemahaman yang dimiliki guru mata pelajaran PPKn tentang materi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia di Sekolah Menengah Pertama wilayah Kota Surabaya. Serta untuk mengkaji lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman guru tersebut.

Dalam penelitian ini, hanya terdapat satu variabel yang menjadi kajian oleh peneliti. Variabel tersebut ialah pemahaman guru mata pelajaran PPKn tentang materi Konstitusi. Variabel ini diukur dengan menggunakan tes yang diberikan kepada sampel yang telah ditentukan. Untuk menghindarkan salah penafsiran dan memudahkan dalam melakukan penilaian terhadap variabel yang diteliti, maka perlu dilakukan pendefinisian dari variabel yang ada. Adapun definisi operasional dari pemahaman guru mata pelajaran PPKn tentang materi Konstitusi ialah kemampuan guru mata pelajaran PPKn tingkat SMP dalam menafsirkan, menyimpulkan, dan menganalisis, serta mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi, baik secara umum maupun secara khusus yang ada di dalam mata pelajaran PPKn pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Kurikulum 2013 yang diukur dengan menggunakan tes.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, “Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu”. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.

Guru merupakan salah satu agen penting dalam sistem pendidikan, sebab guru adalah orang yang memegang peran penting dalam merancang strategi pembelajaran yang akan dilakukan (Zamroni, 2001: 60). Guru harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan atau yang dikenal dengan standar kompetensi guru. Standar ini diartikan sebagai suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan. Lebih lanjut Suparlan (2006: 85), menjelaskan bahwa standar kompetensi guru adalah “Ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional dengan bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan”.

Guru harus memiliki kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Suparlan (2006: 85) berpendapat bahwa, “Kompetensi guru adalah melakukan kombinasi kompleks dari pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang ditujukan guru dalam konteks kinerja yang diberikan kepadanya”. Sehingga kompetensi guru adalah kemampuan melakukan tugas mengajar dan mendidik yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan (Sahertian, 1994: 73).

Berkaitan dengan kompetensi guru dalam konteks kebijakan, pada Pasal 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa, “Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi Pedagogik; Kompetensi Kepribadian; Kompetensi Profesional; dan Kompetensi Sosial”.

Kompetensi-kompetensi tersebut dijadikan patokan untuk menghasilkan guru yang profesional. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Hal serupa terkait tugas seorang guru tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa, “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam pasal 3 ayat 4 menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi (1) pemahaman wawasan atau landasan pendidikan; (2) pemahaman terhadap peserta didik; (3) pengembangan kurikulum; (4) perancangan kurikulum; (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran; (7) evaluasi hasil belajar; dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Berkaitan dengan kompetensi kepribadian, dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam pasal 3 ayat 5 bahwa kompetensi kepribadian yang hendaknya dimiliki oleh seorang guru profesional sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang: (1) beriman dan bertakwa; (2) berakhlak mulia; (3)

arif dan bijaksana; (4) demokratis; (5) mantap; (6) berwibawa; (7) stabil; (8) dewasa; (9) jujur; (10) sportif; (11) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (12) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan (13) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Sedangkan untuk kompetensi profesional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam pasal 3 ayat 7 menjelaskan bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan (2) konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Hal yang berkaitan dengan kompetensi sosial, juga dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam pasal 3 ayat 6, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk (1) berkomunikasi lisan, tulis dan/atau isyarat secara santun; (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; (4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan (5) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi-kompetensi tersebut hendaknya juga dimiliki oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang termasuk ke dalam rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, PPKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut (a) berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (b) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi; (c) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain; (d) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun fungsi dari pelajaran PPKn sebagaimana tercantum dalam Depdikbud (1995:1) adalah (1) mengembangkan keterampilan siswa, (2) mengembangkan sikap sosial dan menumbuhkan nilai yang berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari, (3) menumbuhkan kreatifitas siswa.

Menurut Tim Direktoral Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2006:11), mata pelajaran PPKn merupakan bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama, serta esensi pendidikan demokratis di Indonesia. Penguasaan guru terhadap materi pelajaran PPKn pada jenjang SMP/MTs, SMA/MA, MK/MAK mencakup komponen yang hendak dikembangkan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terdiri dari (1) Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara, berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945 maupun yang terkonvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional; (2) Keterampilan Kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup beberapa hal yaitu *intellectual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi).

Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain berpikir kritis. Cholisin (2006: 5-6), menyebutkan komponen keterampilan intelektual warga negara meliputi (a) mengidentifikasi (menandai/menunjukkan) dibedakan

menjadi keterampilan membedakan, mengelompokkan/mengklasifikasikan, menentukan bahwa sesuatu itu asli; (b) menggambarkan (memberikan uraian/ilustrasi); (c) menjelaskan (mengklarifikasikan/menafsirkan); (d) menganalisis, menyangkut kemampuan untuk menguraikan; (e) mengevaluasi pendapat/posisi; (f) mengambil pendapat/posisi; (g) mempertahankan pendapat/posisi.

Keterampilan partisipasi akan terwujud apabila semua orang tanpa kecuali ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan. Cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya apabila setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Cholisin (2006: 6), menyebutkan komponen keterampilan partisipasi mencakup berinteraksi, memantau dan mempengaruhi. Keterampilan partisipasi yang dikembangkan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mencakup (a) berinteraksi (termasuk berkomunikasi) terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik; (b) memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik; (c) mempengaruhi proses politik, pemerintahan baik secara formal maupun informal.

Serta yang terakhir (3) Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*), merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, sistem politik yang berfungsi sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum. Cholisin (2006:7), menyebutkan ciri-ciri atau karakter privat (pribadi) dan karakter publik (kemasyarakatan) meliputi (a) menjadi anggota masyarakat yang independen (mandiri); (b) memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik; (c) menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu; (d) berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif; serta (e) mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat.

Komponen-komponen tersebut harus dikembangkan oleh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang memiliki kompetensi berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi berbagai isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara bertanggung jawab agar masyarakat Indonesia dapat berdampingan dengan bangsa-bangsa lain secara langsung maupun tidak langsung.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mixed methods*). Menurut Creswell (2005: 510), pendekatan campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Hal ini

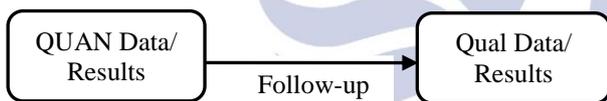
sejalan dengan apa yang diungkapkan Sugiyono (2013: 404), yang mana mengungkapkan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu penelitian yang mengombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif.

Penelitian ini menggunakan tipe *Explanatory Mixed Methods Designs* atau lebih tepatnya yang kerap dikenal dengan Strategi Eksplanatoris Sekuensial. Creswell (2005: 515), menjelaskan bahwa strategi ini diterapkan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama yang diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua yang dibangun berdasarkan hasil awal kuantitatif.

Creswell (2005: 515) mengungkapkan tiga hal yang mendasar di dalam tipe ini, diantaranya ialah :

“The mixed methods researcher place a priority on quantitative data collection and analysis; The mixed methods researcher collects quantitative data first in the sequence; The mixed methods researcher uses the qualitative data to refine the results from the quantitative data.”

Sehingga dapat digambarkan alur penelitian ini nantinya ialah sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Alur Pendekatan Penelitian

Pendekatan kuantitatif di dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, serta untuk mengukur analisis prosentase hasil tes. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil wawancara setelah terlebih dahulu mengetahui sejauh mana hasil tes pemahaman yang dicapai, serta pemaknaan yang lebih mendalam adanya konstitusi oleh guru PPKn anggota Tim MGMP SMP Kota Surabaya terkait konsep Konstitusi.

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini ialah mencakup sekolah menengah pertama negeri yang berada di wilayah kota Surabaya. Pemilihan daerah penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan dekat dengan tempat tinggal peneliti. Disamping itu, pendidikan di wilayah kota Surabaya juga menjadi salah satu tumpuan dalam pendidikan skala nasional.

Dengan populasi kurang lebih adalah 125 orang guru, maka sampel diambil 30% dari jumlah keseluruhan. Sehingga ada 30 orang guru yang dijadikan responden

dalam pengambilan data kuantitatif. Dan pengambilan data kualitatif berdasarkan perolehan skor prosentase uji, diambil perwakilan beberapa guru yang mewakili masing-masing kriteria.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah tes, wawancara, dan dokumentasi. Tes digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman yang dimiliki oleh guru Tim MGMP PPKn Kota Surabaya terhadap materi Konstitusi. Pada tes ini terdapat beberapa soal yang harus dikerjakan oleh responden. Adapun jenis dari soal tersebut ada dua, yaitu pilihan ganda dan uraian. Pilihan ganda berisikan pertanyaan-pertanyaan yang singkat, berkaitan dengan hal umum tentang konstitusi dan konstitusi yang berlaku di Indonesia, sedangkan soal uraian berisikan hal-hal yang lebih khusus dan mendalam terkait pemahaman guru tentang materi konstitusi yang ada di dalam materi kajian mata pelajaran PPKn Kurikulum 2013 tingkat SMP.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui tanya jawab langsung kepada beberapa narasumber. Adapun narasumber yang menjadi informan adalah perwakilan dari masing-masing narasumber yang telah digolongkan ke dalam tiap-tiap kriteria. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat mengetahui secara langsung dan mendalam informasi terkait hasil pemahaman dari tabulasi nilai tes yang telah diperoleh guru PPKn akan materi Konstitusi di dalam Kurikulum 2013. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mencatat hal-hal yang dianggap memiliki kaitan dengan hasil penelitian dan dapat menunjang data-data penelitian.

Teknik pengolahan data yang digunakan ada dua macam yaitu pengolahan data kuantitatif dan pengolahan data kualitatif. Untuk pengolahan data kuantitatif, digunakan uji validitas, uji reliabilitas, serta prosentase. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengukur kevalidan dan keajegan instrumen penelitian. Adapun rumus yang dipakai oleh peneliti adalah rumus korelasi *product moment* dengan angka kasar, yaitu :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Yang mana :

r_{xy} = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

N = jumlah sampel

X = nilai suatu butir sampel

Y = nilai total butir sampel

Apabila harga r_{xy} lebih besar dari harga kritik dalam tabel maka korelasi tersebut signifikan atau valid.

Sedangkan rumus reliabilitas yang dipakai oleh peneliti adalah rumus Spearman-Brown, yaitu :

$$r_{II} = \frac{2 r^{1/2/2}}{(1 + r^{1/2/2})}$$

yang mana :

r_{11} = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan

$r_{1/2/2}$ = korelasi antara skor-skor setiap belahan

Apabila $r_{11} > r_{\text{tabel}}$, maka tes tersebut dapat dikatakan reliabel

Presentase digunakan untuk menghitung perolehan skor pemahaman guru, identifikasi skor tiap sub materi konstitusi, serta perolehan skor berdasarkan level kognitif dalam taksonomi bloom. Rumus presentase yang digunakan adalah:

$$\text{Presentase (\%)} = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Yang mana :

% = Presentase frekuensi dari tiap jawaban responden

f = Frekuensi tiap jawaban dari responden

N = Jumlah responden

Adapun kriteria penilaian yang digunakan ialah:

Tabel 1. Kriteria Penggolongan Berdasarkan Presentase (Arikunto, 2009: 245)

Nilai Presentase	Kriteria
80% - 100%	Sangat Baik
66% - 79%	Baik
56% - 65%	Cukup Baik
40% - 55%	Kurang Baik
<39%	Sangat Kurang

Sedangkan pengolahan data kualitatif, menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang kedua, yaitu model analisis interaktif. Pada model ini terdapat tiga langkah analisis, (1) reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), dan (3) penarikan kesimpulan (*verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji coba validitas instrumen tes, diperoleh hasil soal-soal mana saja yang memiliki angka validitas tinggi dan soal-soal mana saja yang memiliki validitas rendah. Terdapat 20 guru yang diujicobakan untuk menghitung validitas dan reliabilitas dalam instrumen penelitian ini. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), maka apabila harga korelasi hasil perhitungan di bawah 0,40, dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga tidak dapat digunakan. Demikian dengan sebaliknya, butir-butir soal tersebut dapat dinyatakan valid apabila memiliki harga korelasi diatas 0,40.

Dari perhitungan 40 soal yang telah dibuat dan diujicobakan maka didapat 21 soal yang dinyatakan valid karena memiliki harga korelasi lebih besar dari harga r_{tabel} ($>0,40$). Peneliti berbekal hasil perhitungan tersebut dan mengambil 20 soal yang memiliki validitas tertinggi untuk

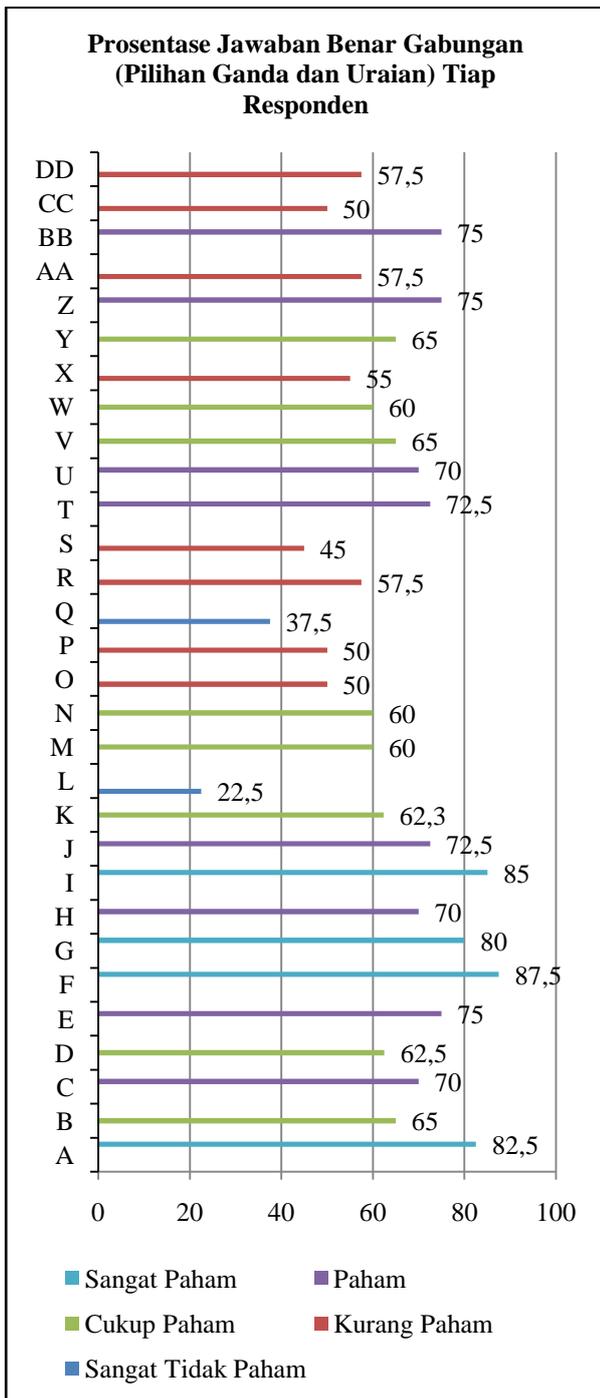
diujikan kepada responden. Dengan tujuan untuk mengukur pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengajar sekolah menengah pertama tentang materi konstitusi.

Sedangkan untuk pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan *internal consistency* yakni Teknik Belah Dua (*split half*) yang dianalisis dengan rumus *Spearman-Brown*. Untuk keperluan itu, maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, yakni kelompok awal (20 soal pertama) dan kelompok akhir (20 soal terakhir). Setelah dihitung dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dengan angka kasar, maka diperoleh $r_{1/2/2} = 0,583$. Kemudian setelah dihitung dengan menggunakan rumus *Spearman-Brown* didapatkan $r_{11} = 0,786$.

Dengan demikian, berdasarkan uji coba instrumen yang telah diujikan kepada guru Pendidikan Profesi Guru ini dapat dinyatakan valid dan reliabel. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perolehan korelasi tiap butir soal yang digunakan untuk menguji pemahaman guru PPKn melebihi harga korelasi tabel ($r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$). Maka, instrumen ini dapat digunakan untuk menguji pemahaman guru dalam pengumpulan data pada penelitian kuantitatif.

Berdasarkan hasil uji pemahaman guru yang mengajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama terhadap materi Konstitusi dengan menggunakan dua tipe soal yaitu soal pilihan ganda dan soal uraian, didapatkan rata-rata sebesar 63,5, dengan nilai minimum yang diperoleh guru sebesar 22,5% dan nilai maksimum yang diperoleh guru sebesar 87,5%.

Presentase jawaban benar berdasarkan tiap responden disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2. Grafik Prosentase Jawaban Benar Gabungan (Pilihan Ganda dan Uraian) Tiap Responden

Grafik diatas, merupakan grafik gabungan skor prosentase akumulatif dari tipe soal pilihan ganda dan uraian yang didapatkan oleh masing-masing responden. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwasannya terdapat 15 orang guru yang mendapatkan skor diatas rata-rata (63,5%), serta terdapat 15 orang guru yang mendapatkan skor di bawah rata-rata (63,5%). Dengan demikian, maka dapat dibuatlah tabel pengelompokan sebagai kesimpulan pengolahan data kuantitatif untuk

mengetahui jumlah dan nama-mana guru yang telah digolongkan ke dalam masing-masing kriteria berdasarkan hasil uji pemahaman yang telah diperoleh. Untuk mengetahui nama-nama guru yang tergolong kedalam masing-masing kriteria, dapat dilihat pada

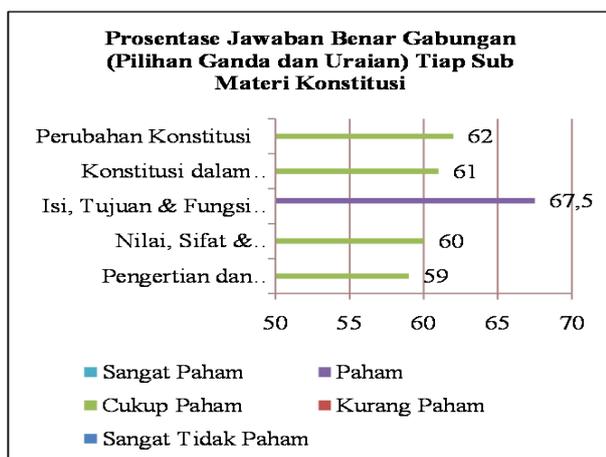
Tabel 2. Pemahaman Guru Tentang Materi Konstitusi Berdasarkan Sebaran Kriteria

No.	Kriteria	Jumlah Guru	Prosentase
1	Sangat Baik	4 orang	80%-100%
2	Baik	8 orang	66%-79%
3	Cukup Baik	8 orang	56%-65%
4	Kurang Baik	8 orang	40%-55%
5	Sangat Kurang	2 orang	<39%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya terdapat 4 (empat) orang guru yang tergolong ke dalam kriteria yang memiliki pemahaman sangat baik yakni mendapat skor antara 80%-100%, terdapat 8 (delapan) orang guru yang tergolong ke dalam kriteria yang memiliki pemahaman baik yakni mendapat skor antara 66%-79%, terdapat 8 (delapan) orang guru yang tergolong ke dalam kriteria memiliki pemahaman yang cukup baik yakni mendapatkan skor antara 56%-65%, dan terdapat 8 (delapan) orang guru juga yang tergolong ke dalam kriteria memiliki pemahaman kurang baik yakni mendapatkan skor antara 40%-55%, serta ada 2 (dua) orang guru yang tergolong ke dalam kriteria memiliki pemahaman yang sangat kurang yakni mendapatkan skor kurang dari 39%. Dengan demikian, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwasannya guru mata pelajaran PPKn tingkat SMP di wilayah kota Surabaya cukup memahami materi konstitusi.

Analisis hasil uji pemahaman guru juga digunakan untuk menghitung perolehan prosentase jawaban benar dari masing-masing sub materi konstitusi. Ada lima sub materi konstitusi yang digunakan acuan oleh peneliti di dalam menggolongkan pemahaman berdasarkan sub materi dalam penelitian ini, diantaranya ialah sub materi tentang (1) pengertian dan pentingnya konstitusi; (2) isi, tujuan dan fungsi konstitusi; (3) nilai, sifat, dan klasifikasi konstitusi; (4) perubahan konstitusi; serta (5) konstitusi dalam Kurikulum 2013.

Adapun hasil perolehan dari masing-masing sub materi Konstitusi berdasarkan jawaban benar responden disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 3. Grafik Prosentase Jawaban Benar Tiap Sub Materi Konstitusi

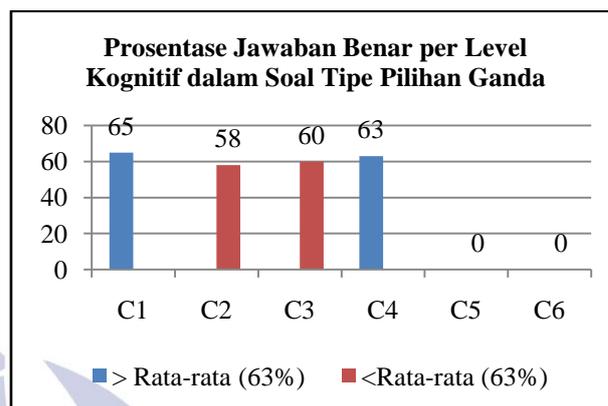
Dari grafik diatas dapat dilihat sejauh mana perolehan hasil uji pemahaman guru Tim MGMP PPKN SMP Kota Surabaya dari tiap-tiap sub materi konstitusi yang terdapat pada soal uji pemahaman, baik berdasarkan soal uji pemahaman dengan tipe soal pilihan ganda ataupun soal uji pemahaman dengan tipe soal uraian. Berdasarkan sub materi yang telah digolongkan oleh peneliti dalam hasil uji pemahaman guru, pada kriteria sub materi yang tergolong sangat baik (66%-79%) ada pada sub materi tentang isi, tujuan, dan fungsi konstitusi yakni dengan skor 67,5%. Sedangkan pada kriteria sub materi yang tergolong cukup baik (56%-65%), ada 4 (empat) sub materi, keempat sub materi tersebut antara lain (1) Nilai, Sifat, dan Klasifikasi Konstitusi (60%); (2) Perubahan Konstitusi (62%); (3) Konstitusi dalam Kurikulum 2013 (61%); dan (4) Pengertian dan pentingnya Konstitusi (59%).

Analisis juga dilakukan pada level kognitif masing-masing butir soal. Analisis level kognitif didasarkan pada taksonomi tujuan pendidikan Bloom dalam ranah kognitif yang telah direvisi, yang mana dalam ranah kognitif dikategorikan menjadi 6 (enam) bagian, yaitu (1) Mengingat (*remember*); (2) Memahami (*understand*); (3) Mengaplikasikan (*apply*); (4) Menganalisis (*analyze*); (5) Mengevaluasi (*evaluate*); (6) Mencipta (*create*).

Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mengategorikan butir soal berdasarkan batasan dan objek langsungnya, disesuaikan dengan indikator per item tes dan langkah-langkah penyelesaian dari tiap soal.

Soal pilihan ganda tersebar pada level C1 atau mengingat, C2 atau memahami, C3 atau mengaplikasi, dan C4 atau menganalisis. Jumlah butir soal pada tipe pilihan ganda yang termasuk ke dalam level C1 adalah sebanyak 12 butir soal, sedangkan jumlah butir soal pada tipe pilihan ganda yang termasuk ke dalam level C2 adalah sebanyak 6 butir soal. Dalam level C3 dan C4

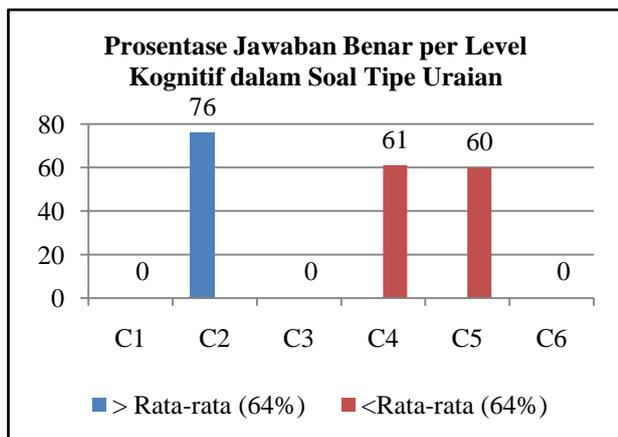
masing-masing hanya terdapat 1 butir soal. Prosentase jawaban benar per level kognitif dalam soal tipe pilihan ganda dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 4. Grafik Prosentase Jawaban Benar per Level Kognitif dalam Soal Pilihan Ganda

Rata-rata jawaban benar dalam soal tipe pilihan ganda adalah sebesar 63%. Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa prosentase jawaban benar untuk butir soal yang termasuk dalam level C1 ialah sebesar 65%, hal ini menunjukkan bahwa prosentase jawab benarnya telah berada diatas rata-rata 63,5%. Prosentase jawaban benar untuk butir soal yang termasuk dalam level C2 ialah sebesar 58%, hal ini menunjukkan bahwa prosentase jawab benarnya masih berada dibawah rata-rata 63,5%. Prosentase jawaban benar untuk butir soal yang termasuk dalam level C3 ialah sebesar 60%, hal ini menunjukkan bahwa prosentase jawab benarnya juga masih berada dibawah rata-rata 63,5%. Sedangkan prosentase jawaban benar untuk butir soal yang termasuk dalam level C4 ialah sebesar 63%, hal ini menunjukkan bahwa prosentase jawab benarnya sama dengan rata-rata 63,5%.

Sedangkan untuk soal uraian tersebar pada level C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, dan C2 atau memahami. Jumlah butir soal uraian yang termasuk ke dalam level C4 adalah sebanyak 2 butir soal, jumlah soal yang termasuk ke dalam level C5 adalah sebanyak 2 butir soal, sedangkan jumlah butir soal yang termasuk ke dalam level C2 adalah sebanyak 1 butir soal. Prosentase jawaban benar per level kognitif dalam soal tipe uraian dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 5. Grafik Prosentase Jawaban Benar per Level Kognitif dalam Soal Uraian

Rata-rata jawaban benar dalam soal tipe uraian adalah sebesar 64%. Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa prosentase jawaban benar untuk butir soal yang termasuk dalam level C2 ialah sebesar 76%, hal ini menunjukkan bahwa prosentase jawab benarnya telah berada diatas rata-rata. Prosentase jawaban benar untuk butir soal yang termasuk dalam level C4 ialah sebesar 61%, hal ini menunjukkan bahwa prosentase jawab benarnya masih berada dibawah rata-rata. Prosentase jawaban benar untuk butir soal yang termasuk dalam level C5 ialah sebesar 60%, Hal ini menunjukkan bahwa prosentase jawab benarnya juga masih berada dibawah rata-rata.

Berdasarkan hasil pengumpulan data kuantitatif yang telah dilakukan pada tanggal 29 Maret 2014, diperoleh berbagai macam prosentase hasil uji pemahaman Tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Surabaya. Hasil perolehan nilai yang dijadikan tumpuan untuk mencari data kualitatif adalah hasil data prosentase gabungan dari tipe soal pilihan ganda dan tipe soal uraian yang diperoleh oleh masing-masing guru. Ada hal yang menarik dari perolehan hasil pengujian pemahaman guru tersebut, yakni munculnya perolehan nilai dari beberapa guru yang tergolong ke dalam kriteria yang sebelumnya telah dibuat. Untuk mengetahui lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman guru-guru tersebut sehingga mendapatkan skor perolehan uji pemahaman yang ada, maka dilakukan wawancara dengan mengambil beberapa perwakilan guru yang mewakili masing-masing kriteria.

Cara belajar seorang guru, adakalanya dapat dengan melatih kepekaan yang ada di dalam diri. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Hizbul.

“Kadangkala, kita perlu memanfaatkan panca indera kita, melatih kepekaan dalam diri kita dengan membaca, mendengar, melihat, dan

merasakan permasalahan yang ada di dalam kehidupan. Membaca tidak harus dari buku, tapi juga dari membaca keadaan.”

Disamping itu, kemampuan seseorang dalam mengevaluasi apa yang ada di dalam dirinya juga berperan penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan kemampuan berpikir seseorang. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Budi.

“Untuk menjadi seorang guru, mengevaluasi diri itu perlu. Kita dapat menilai diri kita, dari kekurangan yang kita miliki. Jika kita belum memahami suatu materi misalnya, berarti kita harus belajar lagi.”

Cara belajar yang lainnya diungkapkan pula oleh Ibu Nanik, yakni berkaitan dengan pengaplikasian ilmu dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya dapat lebih mudah diingat dan dipahami.

“Saya itu lebih menyukai rumpun ilmu menerapkan ilmu yang ada secara langsung dalam kehidupan nyata. Apalagi PPKn ini kan sangat erat kaitannya dengan kehidupan, jadi tentunya dapat lebih mudah dimengerti. Ketika kita sudah benar-benar mengalami maka nantinya kita akan bisa memahami ilmu itu dengan baik.”

Proses habituasi juga dapat menjadi sebuah cara dalam mengembangkan kemampuan dan pemahaman di dalam diri seseorang. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Rahayu.

“Kita perlu membiasakan diri untuk belajar, dalam bentuk apapun itu. Bisa dengan membaca buku-buku, mendengarkan berita meski hanya beberapa menit saja, berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan teman. Karena ketika kita sudah terbiasa belajar, maka tentu tidak ada keterpaksaan belajar, sehingga kita bisa lebih mudah menambah pengetahuan kita.”

Hal serupa diungkapkan juga oleh Ibu Nanik, yakni dengan habituasi untuk membeli buku.

“Biasakan membeli buku. Untuk membeli buku jangan pernah ada pikiran negatif, jadikan buku itu sebagai investasi pengetahuan masa depanmu.”

Pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, tak terikat oleh waktu ataupun keadaan tertentu. Pengetahuan tidak hanya bersumber dari buku, namun juga dari lingkungan. Hal ini dipaparkan oleh Ibu Nanik, bahwa sumber belajar tidak harus dari buku, dapat dari

sesama teman dengan saling bertukar pikiran dan berdiskusi jika sedang kesulitan, dapat dengan menggunakan media-media sumber informasi, dapat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya, dsb.

“Saya menambah pengetahuan saya bukan hanya dari buku mbak, sumber belajar yang lainnya juga tidak kalah penting. Biasanya saya suka berdiskusi dengan sesama guru PPKn di tempat saya mengajar, dengan teman-teman MGMP, dari berita, internet. Saya juga sering mendapatkan ilmu dari kegiatan-kegiatan seminar. Beberapa waktu yang lalu saya juga dijadikan sebagai model pembelajaran, nah saya juga banyak belajar dari situ.”

Pemahaman memiliki keterkaitan erat dengan aspek kognitif yang ada di dalam diri seseorang. Aspek kognitif tersebut tidak serta merta begitu saja dimiliki oleh seorang guru, sebab kemampuan seorang guru dalam memahami suatu materi tentunya ada beberapa hal yang melatarbelakangi dan melandasi. Hal inilah yang menyebabkan antara guru yang satu dengan guru yang lain memiliki perbedaan dalam hal pemahaman akan suatu materi dalam rumpun keilmuan yang dia ampu dan dia ajar.

Kemampuan memahami seseorang juga dapat dipengaruhi oleh usia. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rahayu, beliau mengungkapkan bahwa semakin bertambahnya usia seseorang tentu akan mempengaruhi tingkat konsentrasinya dalam memahami suatu materi. Yang mana masalah seperti ini tentu juga dialami oleh guru-guru PPKn.

“Tentunya tidak semua materi PPKn dikuasai dengan baik. Apalagi kita semakin bertambah usia, sehingga tidak menutup kemungkinan penyakit lupa itu ada.”

Pernyataan tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Miasih. Yang mana beliau mengungkapkan bahwa :

“Usia itu juga berpengaruh terhadap kemampuan kognitif seseorang, saya sendiri mengalami itu. Saya mencoba belajar dan menambah wawasan dengan membaca, namun beberapa hari kemudian sudah lupa. Belum lagi ini mata sudah tua mbak, buat membaca sebentar saja sudah mudah mengalami lelah dan pedih rasanya.”

Adanya perasaan suka yang memunculkan ketertarikan terhadap rumpun sosial, dapat menjadikan seorang guru

paham akan suatu materi dalam mata pelajaran PPKn. Hal ini dipaparkan oleh Ibu Nanik.

“Dari dulu saya suka dengan mata pelajaran sosial. PPKn kan termasuk mata pelajaran sosial, saya suka menghafal dan praktek. Perasaan suka ini sudah ada sejak saya SMP, ketika ada guru IPS dan PPKn masuk kelas, saya sangat semangat. Karena yang dipelajari bukan teori saja, ada praktek dan pengamatan langsungnya di kehidupan bermasyarakat.

Faktor lain yang mempengaruhi pemahan guru ialah berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia serta kemauan yang ada di dalam diri mereka untuk melatih dan mengembangkan wawasan yang mereka miliki. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nanik.

“Begini ya mbak, masalahnya kan SDM kita itu punya kemampuan masing-masing, ada yang gemar menambah wawasannya, namun juga ada pula yang nyaman dengan kemampuannya saat ini sehingga tidak memanfaatkan media-media ilmu pengetahuan sebagai penambah wawasannya. Terkadang saya juga sedih kalau ada guru yang demikian, mereka malas memanfaatkan sarana yang ada untuk menambah pengetahuan.”

Disamping itu, lingkungan dapat menjadi salah satu faktor luar yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang. Hal mengenai lingkungan yang berpengaruh terhadap pemahaman seseorang diungkapkan oleh Bapak Budi.

“Lingkungan berperan penting dalam hal peningkatan kemampuan berpikir seseorang. Misalnya saja ketika kita sering ada masalah dalam lingkungan keluarga ataupun pergaulan dengan teman, tentunya dapat mempengaruhi prosentase berpikir seseorang. Pikiran jadi terpecah, akibatnya daya pikir dan pemahamannya akan melemah.”

Ibu Alimah juga mengungkapkan bahwa pergantian kurikulum yang baru juga mempengaruhi proses pemahaman guru akan suatu materi yang menjadi bahan ajar.

“sekarang ini kan mulai diterapkan kurikulum baru (Kurikulum 2013), materi konstitusi di dalamnya sangat banyak dan banyak juga yang tidak tergolong dalam cakupan materi kurikulum lama. Sehingga tentu banyak guru yang belum paham, dengan ini pemahaman guru akan materi-materi yang baru tentunya masih perlu diasah lagi”

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan menganalisis dan mengungkap pemahaman yang dimiliki oleh guru PPKn yang tergabung ke dalam Tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) wilayah Kota Surabaya, dapat dilihat bahwasannya kemampuan guru-guru tersebut tergolong cukup baik dalam memahami materi tentang Konstitusi. Hal ini terlihat dari hasil skor perolehan prosentase yang didapatkan oleh guru-guru MGMP tersebut baik pada soal tipe pilihan ganda maupun tipe soal uraian hasilnya cukup dari apa yang diharapkan. Meski demikian, guru yang masih tergolong ke dalam kriteria yang memiliki pemahaman kurang baik dan sangat kurang memahami materi Konstitusi masih cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya 15 orang guru yang mendapatkan skor hasil perolehan prosentase diatas rata-rata (63,5%), serta terdapat 15 orang guru pula yang mendapatkan skor di bawah rata-rata (63,5%).

Disamping itu, berdasarkan hasil kajian penelitian lebih lanjut yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, diperoleh beberapa hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Beberapa hal yang ada diantaranya adalah berkaitan dengan strategi belajar guru, sumber belajar guru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman yang dimiliki oleh seorang guru.

Strategi belajar guru, merupakan cara-cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam melatih dan mengembangkan kemampuan kognitif yang ada di dalam dirinya. Guru bukan hanya dituntut untuk dapat merancang strategi pembelajaran yang akan digunakan pada kegiatan belajar mengajar saja, namun hendaknya dia juga memiliki strategi atau cara khusus yang bisa dilakukan dalam menggali dan menambah wawasan yang dia miliki. Sehingga seorang guru tidak hanya mengandalkan kemampuannya pada saat itu. Perlu adanya suatu pengembangan dalam kemampuan kognitif yang dimiliki.

Cara belajar antara guru yang satu dengan guru yang lain tentunya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, diperoleh beberapa strategi atau cara belajar yang dilakukan oleh guru PPKn dalam menggali dan mengembangkan kemampuannya dalam memahami suatu ilmu pengetahuan, strategi tersebut diantaranya ialah, pertama, melatih kepekaan diri yakni berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dapat peka pada permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dengan melatih kepekaan yang ada di dalam diri, tentunya dapat digunakan sebagai salah satu cara melatih dan mengembangkan pemahaman. Kepekaan dapat

dilakukan dengan memanfaatkan fungsi alat indera yang dimiliki oleh seseorang, misalnya saja dengan cara melihat, mendengar, dan merasakan. Melihat dapat dilakukan dengan membaca, bukan hanya buku saja yang dapat dibaca namun juga keadaan yang terjadi. Ketika seseorang mulai melihat, mendengar, dan merasakan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan di sekitarnya, maka seakan-akan orang tersebut seperti mengalami secara langsung dan nantinya dapat memahami lebih mendalam hal-hal yang terkandung di dalam permasalahan itu.

Kedua ialah kemampuan dalam mengevaluasi diri. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, hal ini dapat dijadikan cara seorang guru PPKn untuk berbenah dari apa yang dirasa masih kurang. Dengan adanya kemampuan untuk mengevaluasi diri, maka seorang guru dapat berupaya untuk memperbaiki dan lebih menambah wawasan pengetahuan akan apa yang belum ia pahami dan yang belum ia mengerti.

Ketiga ialah mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan nyata. Adakalanya suatu ilmu yang dimiliki dapat lebih terasa manfaatnya jika sudah diterapkan di dalam kehidupan nyata. Hal seperti ini tentunya harus dibiasakan. Dalam penerapan materi Konstitusi misalnya, dapat diterapkan pada lingkungan yang memiliki cakupan lebih kecil seperti keluarga atau sekolah. Ketika seseorang mendapatkan ilmu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, maka nantinya orang tersebut akan dapat lebih memahami ilmu yang dia pelajari, bukan hanya itu orang tersebut juga dapat memberikan solusi dengan mengaitkannya berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Hal seperti ini kerap kali dapat menjadi pemicu seseorang untuk dapat lebih mudah dalam mengingat ilmu tersebut. Proses pengaplikasian ilmu pengetahuan juga dapat dilakukan dengan kegiatan bersosialisasi dan berkomunikasi bersama orang-orang sekitar. Kebiasaan untuk dapat berdiskusi dan berkomunikasi tentunya dapat mengasah kemampuan seseorang dalam hal memahami suatu masalah atau kejadian. Yang mana tentunya masalah ini tidak menutup kemungkinan dapat memiliki keterkaitan dengan ilmu yang dia miliki.

Kelima adalah perbaiki *mindset* untuk menjadi lebih baik menjadi seorang guru harus memiliki kemampuan berpikir untuk menjadik lebih baik. Dengan adanya proses berpikir untuk menjadi lebih baik, akan membuat seseorang menjadi senantiasa menggali ilmu untuk mengembangkan kemampuannya menjadi lebih baik lagi. Keyakinan seseorang untuk dapat melakukan suatu hal, tentunya dapat mempermudah mereka dalam memahami dan mengingat apa yang telah mereka pelajari.

Serta strategi yang terakhir adalah menekuni kegemaran yang bersifat positif. Hobi dapat

dimanfaatkan sebagai cara untuk dapat meningkatkan daya pikir dan pemahaman. Misalkan saja dengan gemar berlangganan koran dan gemar membeli buku-buku. Tentunya banyak pengetahuan tentang rumpun keilmuannya yang akan didapatkan sehingga dapat melatih pemahaman seseorang. Dengan adanya proses pemanfaatan pada kegemaran yang dimiliki, dan masih berkaitan dengan rumpun keilmuan yang dia tekuni, hal ini dapat membuat tingkat prosentase pemahaman seseorang terhadap ilmu yang dia miliki itu menjadi semakin baik lagi.

Sumber pengetahuan guru merupakan asal dari mana seorang guru dapat memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Pengetahuan bisa didapatkan tidak hanya melalui membaca buku, namun juga berasal dari lingkungan dan media sosial. Seorang guru PPKn tidak harus membaca buku-buku yang berkaitan dengan rumpun keilmuannya saja, yaitu tentang undang-undang, peraturan pemerintah atau kebijakan, dsb. Namun juga bisa diperoleh dengan adanya proses atau kegiatan interaksi dengan lingkungan misalnya keluarga, teman, siswa ataupun masyarakat. Disamping itu untuk menambah pemahaman yang dimiliki oleh guru, sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan ialah media sosial, baik media cetak ataupun media elektronik.

Proses pemanfaatan sumber pengetahuan yang baik dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih komprehensif dan bertahan lebih lama dalam daya ingat seseorang. Hal ini dikarenakan pengetahuan diperoleh berdasarkan cara yang disesuaikan dengan kemampuan serta keinginan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seorang guru merupakan hal-hal apa sajakah yang berperan dan memiliki andil dalam kemampuan kognitif seorang guru. Perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tentunya ada beberapa hal yang melatarbelakangi. Hal-hal inilah yang dapat menjadi faktor berpengaruh dalam proses penggalan ilmu dan cara berpikir seseorang. Guru Tim MGMP PPKn SMP menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pemahaman antara orang yang satu dengan orang yang lain. Berdasarkan sumbernya, faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor dari dalam serta faktor dari luar.

Faktor dari dalam (*internal*), faktor ini berasal dari dalam diri manusia. Hal yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut misalnya, adanya ketertarikan dari dalam diri seorang guru. Ketertarikan ini bermula dari adanya perasaan suka sehingga dapat menghasilkan rasa nyaman dalam diri seseorang. Orang tersebut tentu akan menggali ilmu pengetahuan dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan. Kemudian dari ketertarikan itu muncul suatu tindakan yang bersifat kontinyu. Dengan demikian, ketika

seseorang telah terbiasa melakukan aktifitas untuk mencari ilmu, maka jika orang tersebut tidak melakukannya maka akan merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Perlu adanya proses habituasi di dalam menggali dan mengembangkan kemampuan intelektual yang dimiliki.

Faktor internal berikutnya adalah berkaitan dengan usia. Usia dapat mempengaruhi proses kemampuan memahami seorang guru. Ketika usia tengah bertambah tentunya kemampuan dan daya tahan tubuh menjadi menurun, hal ini dapat menjadi faktor pemicu dalam kegiatan belajar seorang guru sehingga terbatas dalam melakukan sesuatu. Kemudian kemampuan kognitif seseorang juga mempengaruhi pemahamannya terhadap suatu hal.

Disamping itu, adanya hambatan mental juga berpengaruh dalam upaya melatih pemahaman seseorang. Misalnya berkaitan dengan adanya kemauan seseorang untuk tetap senantiasa menggali dan menambah pengetahuan yang dimiliki senantiasa menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Adanya kemauan ini dapat menjauhkan seseorang dari perasaan malas ataupun acuh akan pengembangan pengetahuan dan pemahamannya.

Faktor yang terakhir adalah berkaitan dengan aspek profesional yang ada di dalam diri seorang guru, yakni berkaitan dengan nilai diri. Bagaimana niat dan tujuan seorang guru dalam mencari ilmu berpengaruh dalam proses dan kegiatan yang dia lakukan. Ketika seorang guru telah memiliki niat dan tujuan yang jelas untuk mengembangkan dan memperdalam pemahamannya, maka hal tersebut dapat mempermudah proses belajar dan pengembangan di dalam dirinya.

Faktor dari luar (*eksternal*) berkaitan dengan adanya pengaruh lingkungan. Berkaitan dengan bagaimana cara seseorang bergaul, bagaimana cara seseorang memanfaatkan lingkungannya dsb. Proses pergaulan tersebut dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, teman, dan sekolah.

Keadaan yang ada di dalam proses interaksi dalam lingkungan keluarga dan teman tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang *broken home*, atau sebuah lingkungan keluarga yang kurang mengutamakan aspek pendidikan, maka tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap daya pikir dan daya paham seseorang. Hal seperti ini tentu tidak menutup kemungkinan dapat dialami oleh seorang guru (khususnya guru PPKn), sehingga proses pemahaman guru PPKn dapat terganggu dikarenakan banyaknya percabangan dalam berpikir.

Hal yang serupa juga dapat terjadi dalam hubungan interaksi dengan teman. Apabila ada suatu permasalahan melanda hubungan pertemanan, sehingga mempengaruhi

proses bergaul terutama dalam hal *sharing* akan suatu permasalahan ataupun kesulitan tentunya akan menjadi tidak sebaik sebelumnya.

Hal yang berbeda dengan permasalahan diatas diungkapkan bahwa, lingkungan keluarga yang harmonis dapat menghasilkan jiwa yang tenang, belajarpun akan lebih nyaman. Serta adanya motivasi atau dukungan dari keluarga dalam menimba ilmu tentu akan mempermudah proses belajar, berpikir, hingga memahami. Dengan demikian pemahaman seseorang juga dapat lebih bersifat jangka panjang.

Lingkungan teman yang mampu hadir menjadi penyemangat dan relasi untuk bertukar pikiran serta menambah pengetahuan dapat menjadi faktor penting dalam mengasah pemahaman seseorang. Ikatan emosional yang terbentuk dalam hubungan pertemanan, dapat menjadikan seseorang merasa nyaman dalam berkomunikasi dan berinteraksi.

Disamping itu, adanya kegiatan dan program yang mendukung dari Dinas Pendidikan tentunya dapat menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menambah pemahaman guru akan suatu materi yang diajarkan. Program-program yang diadakan oleh dinas terkait, tentunya memiliki kesinambungan dalam proses pemajuan para pendidik bangsa.

Faktor eksternal yang lainnya adalah mencakup masalah proses pergantian kurikulum lama dengan kurikulum baru tentunya tidak serta merta mulus dan dengan mudah diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Membutuhkan adaptasi terlebih dahulu dengan keadaan yang ada, baik dalam hal infrastruktur sekolah hingga kemampuan guru dan siswa. Kurikulum 2013 khususnya dalam mata pelajaran PPKn, materi kajian tentang konstitusi lebih banyak jika dibandingkan dengan kurikulum yang sebelumnya. Hal ini tentunya juga dapat mempengaruhi pemahaman guru, sebab guru telah terbiasa dengan memahami materi-materi konstitusi yang bersifat khusus, misalnya ialah berkaitan dengan sejarah konstitusi Negara Republik Indonesia.

Hubungan Antara Temuan Penelitian dengan Teori

Guru profesional sudah seharusnya memiliki kompetensi-kompetensi yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalam peraturan tersebut menyebutkan ada 4 (empat) kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Keempat kompetensi khusus tersebut diantaranya ialah Kompetensi Pedagogik; Kompetensi Kepribadian; Kompetensi Profesional; dan Kompetensi Sosial.

Pemahaman guru terhadap suatu materi memiliki keterkaitan dengan aspek yang terkandung di dalam kompetensi profesional. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam pasal 3 ayat 7 menjelaskan bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: (1) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan (2) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Berdasarkan hasil prosentase uji pemahaman guru MGMP PPKn SMP yang mengajar di Kota Surabaya, dapat dilihat bahwasannya kemampuan memahami guru dalam materi konstitusi cukup baik, meski hasil perolehan rata-rata yang didapatkan masih cukup jauh dari apa yang diharapkan. Masih sedikit guru yang tergolong memiliki pemahaman yang baik terhadap konten materi konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru masih kurang dan harus diperbaiki lagi.

Keempat kompetensi yang ada harus berjalan dan dimiliki oleh guru secara seimbang. Namun berdasarkan hasil penelitian pada organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di jenjang Sekolah Menengah Pertama Kota Surabaya, kompetensi yang lebih banyak diasah mayoritas hanya bertumpu dalam aspek kompetensi pedagogis saja yakni berkaitan dengan kemampuan mengelola pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dirancang juga hanya berkaitan dengan pengembangan kompetensi pedagogik. Hal ini dapat dilihat pada program kegiatan yang telah disusun oleh Tim MGMP PPKn SMP. Kegiatan-kegiatan yang mampu mengasah dan memperdalam pemahaman guru PPKn akan konten dari suatu materi masih belum ada. Kegiatan yang berkaitan dengan aspek profesional sebatas kegiatan yang mengurutkan dan menggolongkan materi-materi yang masih memiliki keterkaitan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dijelaskan bagaimana hasil perolehan skor prosentase pemahaman guru terhadap materi Konstitusi. Kriteria prosentase yang telah dibuat, digunakan sebagai pedoman dalam menggolongkan hasil yang diperoleh oleh masing-masing guru PPKn. Pada kriteria yang memiliki pemahaman sangat baik (80%-100%) didapatkan oleh empat orang guru, pada kriteria yang memiliki pemahaman baik (66%-79%) didapatkan

oleh delapan orang guru, pada kriteria yang memiliki pemahaman cukup baik (56%-65%) didapatkan oleh delapan orang guru, sedangkan pada kriteria yang tergolong kurang baik (40%-55%) juga didapatkan oleh delapan orang guru, serta pada kriteria sangat kurang memahami (<39%) didapatkan oleh dua orang guru. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata, terdapat 15 orang guru yang mendapatkan skor diatas 63,5%.

Perhitungan juga dilakukan dalam menghitung prosentase pemahaman guru PPKn terhadap tiap-tiap sub materi yang terkandung di dalam materi tentang Konstitusi. Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP memiliki tingkat penguasaan materi Konstitusi paling rendah pada sub materi pengertian dan pentingnya konstitusi (59%); nilai, sifat, dan klasifikasi konstitusi (60%); konstitusi dalam Kurikulum 2013 (61%); perubahan konstitusi (62%); serta prosentase paling tinggi pada sub materi isi, tujuan dan fungsi konstitusi (67,5%).

Hasil perhitungan pada level kognitif, prosentase jawaban benar paling banyak berada pada level C2 (memahami) yaitu sebesar 67%, diikuti hasil perolehan pada level C1 (mengingat) sebesar 65%, level C4 (menganalisis) sebesar 62%, level C3 (mengamplifikasi) sebesar 60%, dan level C5 (mengevaluasi) sebesar 60%.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya kemampuan guru-guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam memahami materi Konstitusi tergolong ke dalam tingkat pemahaman yang cukup baik. Namun masih banyak pula, guru yang tergolong ke dalam kriteria kurang memahami dan bahkan ada guru yang tergolong ke dalam kriteria yang sangat kurang memahami materi konstitusi. Sehingga kompetensi profesionalisme yang dimiliki oleh guru-guru PPKn SMP di wilayah Kota Surabaya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Saran

Dari hasil penelitian ini yang menunjukkan tingkat pemahaman guru PPKn SMP terhadap materi Konstitusi cukup baik, meski masih ada beberapa guru yang tergolong masih kurang memahami dan bahkan sangat tidak memahami materi konstitusi. Untuk itu sudah seharusnya perlu diadakannya perbaikan mutu profesionalitas seorang guru, hal ini dapat dilakukan dengan menambah dan mengasah lagi pengetahuan dan pemahaman masing-masing guru PPKn tingkat SMP akan materi konstitusi. Mengingat materi konstitusi memiliki cakupan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan materi lain yang ada di dalam mata pelajaran PPKn.

Disamping itu, perlu diadakannya program-program yang mampu mengasah dan melatih pemahaman guru PPKn, khususnya bagi guru yang dianggap masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Program tersebut dapat diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, LPTK, ataupun Lembaga Sertifikasi Guru. Perlu juga dilakukan penelitian serupa yang dapat menganalisis pemahaman guru akan materi secara keseluruhan, sehingga bisa menjadi lebih kompleks dan dapat diketahui materi-materi apa saja yang perlu ada pembinaan secara khusus dan berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Cholisin, dkk. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press
- Creswell, John. W. 2005. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. New Jersey: Pearson Education, Inc., Upper Saddle River.
- Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Mulyasa, E. 2007. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2012. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningrum, Epon. 2009. *Metode Penelitian Geografi*. Bandung: Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen.
- Sahertian, Piet. 1994. *Profil Pendidikan Profesional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suparlan. 2006. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Ridwan, M. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta

Zamroni. 2001. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing

Kemendikbud. 2012. *Uji Kompetensi Awal Guru jenjang SD, SMP, SMA*.
(<http://ukg.kemendikbud.go.id/info.html>), Diakses Januari 2014.

